

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Berdasarkan bentuknya, kerja sama ekonomi internasional terbagi dalam 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kerja sama bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara.

Kerja sama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Kerja sama regional

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab.

3. Kerja sama multilateral

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerja sama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Kerja sama internasional

Kerja sama internasional adalah kerja sama antara negara-negara diseluruh dunia.

Sedangkan bentuk kerja sama dibidang lain, seperti :

1. Kerja sama dibidang ekonomi, misalnya FAO, IMF, IBRD, UNCTAD.
2. Kerja sama dibidang sosial, misalnya ILO, IRO, UNICEF, WHO.
3. Kerja sama dibidang kebudayaan, misalnya pendidikan, IPTEK.
4. Kerja sama dibidang pertahanan, misalnya SEATO, ANZUS, NATO, CENTO.

Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.

Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan.¹

Begitu pula kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia dengan Jerman dalam tujuan mengembangkan sektor-sektor tertentu. Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Jerman dimulai tahun 1952 sejak diresmikannya hubungan diplomatik untuk pertama kalinya melalui pendirian Kantor Perwakilan RI di Bonn, Jerman Barat, yang kemudian diresmikan menjadi Kedutaan Besar RI di Bonn pada tahun 1954. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Jerman Timur melalui pendirian Kedutaan Besar RI di Berlin Timur pada tahun 1976. Sejak saat itu hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Jerman Barat dan Jerman Timur berkembang cukup erat di berbagai bidang kerjasama. Sejalan dengan tuntutan untuk melakukan Reunifikasi Jerman baik di Jerman Barat maupun di Jerman Timur, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendukung terwujudnya Reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman menunjukkan bukti bahwa integrasi bangsa Jerman telah mempersatukan negara Jerman Barat dan Jerman Timur dalam kesatuan politik, ekonomi dan sosial. Setelah Reunifikasi Jerman, pada tahun 1999 Kedutaan Besar RI di Bonn dipindahkan ke Berlin berkaitan dengan penentuan Berlin sebagai ibukota Jerman.

¹“Hubungan Kerjasama Internasional” dalam <http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html> diakses pada tanggal 10 November 2015

Hubungan Indonesia-Jerman terus ditingkatkan dalam berbagai bidang kerjasama antara lain: politik, ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya dan pendidikan. Dalam hubungan kerjasama politik, kedua negara melakukan saling dukung dalam kerjasama di forum internasional. Jerman merupakan negara yang selalu mendukung integritas.

Negara Kesatuan RI. Intensitas kunjungan pejabat tinggi di kedua negara juga terus meningkat sebagai upaya menggali peningkatan hubungan bilateral. Pejabat tinggi Jerman yang terakhir melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dilakukan oleh Kanselir Gerhard Schroeder pada tanggal 13 - 14 Mei 2003. Selanjutnya kunjungan Presiden RI ke Jerman pada tanggal 15 - 16 Desember 2009 dalam rangka pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Jerman Horst Kohler. Kedua negara juga telah memiliki forum Konsultasi Bilateral pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) yang secara reguler membahas perkembangan kerjasama bilateral Indonesia Jerman di segala bidang.²

Dengan diadakannya kerjasama antara Indonesia dengan Jerman tersebut diharapkan membuka peluang baru kerjasama dalam pengembangan-pengembangan diberbagai bidang terutama dibidang kerjasama pertahanan. Pasalnya, pada periode antara tahun 2000-2011, kondisi alutsista Indonesia jauh tertinggal dengan negara

² "MOMENTUM 60 TAHUN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-JERMAN" dalam http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6018 diakses pada tanggal 10 November 2015

lain. Disejajarkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi paling bawah. Hal itu disebabkan belum diberikan kesempatan kepada perusahaan yang ada, namun setelah presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengembangan alutsista produk dalam negeri, maka terlihat perkembangan yang semakin pesat.³

Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia dan Jerman mengimplementasikan kesepakatan kerja sama komprehensif kedua negara dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang riset dan teknologi, serta di bidang pertahanan, yang dituangkan dalam Deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta itu ditandatangani oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Yudhoyono saat Kanselir Jerman tersebut berkunjung ke Indonesia pada tahun 2012.⁴

Alasan Indonesia memilih Jerman sebagai mitra ekonominya adalah seperti yang dikatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa Jerman adalah ekonomi terbesar di Eropa, ekonomi nomor keempat terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi nomor 15 dunia.

Jerman adalah salah satu negara pengekspor senjata selain beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Prancis. Jerman tergolong negara industri yang paling maju perkembangannya di dunia serta merupakan perekonomian nasional terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang. Jerman merupakan mitra

³ Romansyah, Setya Bayu 2015. *KERJASAMA JERMAN DAN INDONESIA DALAM HAL PEMBELIAN SENJATA MILITER UNTUK MODERNISASI ALUTSISTA TNI* dalam [PDF File]

⁴ “Indonesia-Jerman Sepakati Deklarasi Jakarta” dalam <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-jerman-sepakati-deklarasi-jakarta/1382416.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2013.

dagang ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Produk ekspor Jerman ke Indonesia menurut data dari Kementerian Luar Negeri Jerman. Pada tahun 2008 Indonesia mendapat kredit sebesar USD 1 miliar dari Jerman untuk membeli persenjataan.⁵

Pada tahun 2005-2009 nilai ekspor senjata Jerman mencapai dua kali lipat dibandingkan lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2000-2004, sehingga menjadikan Jerman sebagai negara terbesar ketiga dalam penjualan senjata di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Pilihan pemerintah Indonesia membeli langsung Alutsista berupa Tank Leopard dari Jerman melalui kontrak MoU mengenai jual beli Tank Leopard dari Jerman ke Indonesia pada tanggal 18 Desember 2012 sebagai negara produsen asli adalah sebuah langkah cerdas dan memiliki dampak strategis positif seperti masalah *Transfer of Technology* (ToT). Indonesia sangat antusias dengan komitmen ToT dalam setiap pembelian alutsista nya. Indonesia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat jangka panjang bagi Indonesia dibalik pembelian satu alutsista. Membeli Leopard dari Jerman yang merupakan negara produsen asli Leopard, tentunya berpeluang untuk meminta ToT yang jauh lebih luas dan lebih strategis.⁶

Dengan melihat peluang yang lebih luas dengan pengadaan alutsista berupa Tank Leopard dari Jerman ini Indonesia mendapatkan peluang keuntungan berupa

⁵ all-here.forumid.net/t80-sejarah-tni-sejak-tahun-1960-an, diakses pada 25 Juli 2014.

⁶ Loc.cit

Transfer of Technology (ToT) yang mana hal ini senada dengan UU no. 16 tahun 2012 mengenai industri pertahanan.

Pada hari Kamis 18 Desember 2012 bertepatan hari kedua pameran Indo Defence 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta akhirnya pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pertahanan menandatangani MoU dengan pemerintah Jerman khususnya Rheinmetall AG. Terdapat dua bentuk MoU, pertama, dalam hal pengadaan Medium Tank untuk ukuran 30 ton dan *Main Battle Tank* (MBT) Leopard 2 ukuran 60 ton serta tank-tank pendukungnya. Kehadiran Tank Leopard di Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari penguatan postur pertahanan Indonesia yang bertujuan untuk membangun kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI dengan segala keunggulan yang diantaranya daya pukul dahsyat, daya gentar besar dan mobilitas tinggi. Kedua adalah MoU pelaksanaan ToT (*Transfer of Technology*) yang akan diberikan kepada PT. Pindad. Penandatanganan MoU yang dilakukan dengan Jerman tersebut merupakan langkah awal untuk hubungan yang lebih lama, khususnya pengadaan tank jenis MBT Leopard 2. Pemerintah Indonesia menginginkan jumlah MBT Leopard sekitar 2 Batalion Satuan, setingkat Leopard untuk Kavaleri TNI Angkatan Darat. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dengan Direktur Rheinmetall AG Jerman, Herald Westernman.⁷ Jumlah tank yang akan dikirim dari Jerman sebanyak 153 unit. Tank tersebut yakni tank Leopard Ri

⁷ “Jalan Panjang si Macan Tutul” dalam http://www.kompasiana.com/dadubias/jalan-panjang-si-macan-tutul_55198b78a333110419b6595f diakses pada tanggal 17 November 2015

sebanyak 61 unit, tank Leopard 2A4 sebanyak 42 unit, dan tank Marder sebanyak 50 unit. Pembelian tank ini juga dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken pada November 2012 lalu. PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat.⁸ Hal ini setara dengan bentuk kesepakatan *Transfer of Technology* yang diberikan Jerman atas pengadaan Tank Leopard.

Dengan adanya kebijakan *Transfer of Technology* dari hasil kerjasama Indonesia dengan Jerman melalui produsen senjata asal Jerman Rheinmettal, industri pertahanan dalam negeri PT. Pindad diuntungkan dengan terlibatnya PT. Pindad dalam pemasangan komponen tertentu Tank Leopard seperti sistem komunikasi dan sistem pendingin. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri sebagai transfer teknologi. Selain itu juga PT. Pindad akan dilibatkan dalam pembuatan amunisi berkaliber besar 120mm bagi kebutuhan amunisi Tank Leopard.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard memberikan kemajuan dibidang pertahanan khususnya peningkatan alutsista bagi TNI dan dengan adanya kerjasama tersebut terselip agenda *Transfer of Technology* yang mana mampu berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan khususnya bagi industri pertahanan dalam negeri. Oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian:

⁸ <http://www.yonkav1.com/bulletin> diakses pada tanggal 17 November 2015

**“Kerjasama Pertahanan Indonesia - Jerman dan Implikasinya bagi
kemajuan Industri Pertahanan Dalam Negeri Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang, untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan utama kerjasama Indonesia dengan Jerman (Rheinmettal AG) khususnya dibidang pertahanan?
- 2) Sejauh mana keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Jerman (Rheinmetall AG) dibidang pertahanan khususnya dalam pengadaan Tank Leopard?
- 3) Bagaimana perkembangan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT. Pindad dengan adanya *Transfer of Technology* dari hasil kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard?

1. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, masalah yang dibahas akan dibatasi dengan berfokuskan pada **kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG Jerman dalam pengadaan Tank Leopard bagi kemajuan dan pengembangan alutsista serta implikasinya terhadap kemajuan dan pengembangan industri pertahanan Indonesia yang selaras dengan tujuan *Transfer of Technology* dari diadakannya kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG dalam pengadaan Tank Leopard.** Adapun periode yang akan diteliti dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dimana Indonesia mulai melakukan kerjasama dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan, tim penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

“Sejauh mana kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard serta pengaruhnya terhadap perkembangan industri pertahanan dalam negeri?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG Jerman dibidang pertahanan termasuk hasil dari kerjasama itu sendiri yang berupa *Transfer of Technology* bagi kemajuan indutri pertahanan Indonesia yaitu PT. Pindad, yang diantaranya adalah :

- a) Untuk mengetahui latar belakang utama kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG Jerman khususnya dibidang pertahanan.
- b) Untuk mengetahui sejauh mana alutsista Indonesia sudah mengalami peningkatan serta perkembangan.
- c) Untuk mengetahui perkembangan *Transfer of Technology* yang diberikan kepada industri dalam negeri khususnya PT. Pindad

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan dengan kerjasama Indonesia dengan Jerman dibidang pertahanan dan dampaknya terhadap industri dalam negeri, yang dalam penelitian ini difokuskan pada kerjasama pengadaan Tank Leopard dan *Transfer of Technology* bagi industri pertahanan dalam negeri yang merupakan hasil dari kesepakatan kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai hal terkait. Adapun kegunaan penelitian ini antarlain :

- a) Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Praktikum Profesi Hubungan Internasional, Program Strata-1, Tahun Akademik 2015-2016.
- b) Untuk mengetahui tujuan dari kerjasama Indonesia dan Jerman dibidang pertahanan khususnya dalam pengadaan Tank Leopard.
- c) Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan industri pertahanan dalam negeri pasca diadakannya kerjasama Indonesia dan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard.
- d) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti di bawah ini:

“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan etika internasional”⁹.

Hubungan Internasional adalah sebuah hubungan yang rumit Mochtar Mas’oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:

⁹ Holsti, K.J. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis., (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26.

Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana.¹⁰

Sebagai sebuah disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori realisme. Sebagaimana HI memiliki pondasi besar yang membuatnya tetap berdiri tegak sebagai studi yang dinamis, teori realisme juga sering disebut sebagai “spektrum ide”¹¹.

Kaum realis berfokus pada *power* dan mengejar keuntungan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. “*The ideology of realism mainly focuses on the term of power with a pessimistic view of human nature’s power, and the pursuit of interest*”¹².

Mereka yang menganut paham realis beranggapan *power* merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam buku *An Introduction to International Relations Australian Perspectives Edited by Richard Devetak, Anthony Burke, and Jim George* “*realists believe that peace in the world*

¹⁰Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Edisi Revisi). Jakarta : LP3S, 1987), hlm. 27.

¹¹ Goodin, Robert E. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 132.

¹²<http://www.icird.org/2012/files/papers/Lalita%20Boonpriwan.pdf> , diakses pada tanggal 16 November 2015.

can be maintained only by balance of power between the most powerful state in the international system”¹³.

Selain percaya pada perimbangan kekuatan kaum realis juga beranggapan hubungan internasional bersifat anarkis, di dalam buku *INTERNATIONAL RELATIONS: THE KEY CONCEPTS* Martin Griffiths and Terry O’Callaghan dijelaskan anarkis adalah *”anarchy from the Greek word anarkhos, meaning ‘without a ruler’, a state of anarchy can be said to prevail when there is no government to keep the peace*”¹⁴.

Atas pemikiran itulah sehingga kaum realis berpendapat tidak ada suatu apa pun yang dapat mengontrol sistem internasional. *“There is no higher authority than the sovereign state to which it can appeal in order to protect itself from a potentially aggressive neighbour*”¹⁵.

Membahas mengenai dunia Hubungan Internasional gambaran di masa lalu yang kita tangkap yaitu suatu interaksi perang dan damai. Kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut *“High Politics”*.¹⁶ Dunia interaksi actor-aktor internasional merupakan *high Politics* pada awalnya interaksi internasional hanya bisa dilaksanakan oleh para pihak penyelenggara pemerintahan dan kenegarawan

¹³<http://quizlet.com/3099377/print/>, diakses pada 16 November 2015.

¹⁴ Griffiths, Martin and O’Callaghan, Terry. *INTERNATIONAL RELATIONS: THE KEY CONCEPTS* (London: Routledge, 2002), hlm. 2.

¹⁵<http://Books.google.com/books?isbn=0521682762> diakses 16 November 2015.

¹⁶ T. May. Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah Global*, (Bandung: Refka Aditama, 2003). Hlm. 1

saja. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*State Actors*) maupun pelaku-pelaku bukan negara (*Non State Actors*).¹⁷

Dwight Waldo dalam Hamdi menyatakan bahwa

*“In general, the more knowledge that is necessary to run a contemporary society, and the more specialization that is a consequence, than the more need of a potential for horizontal rather than vertical cooperative arrangements”*¹⁸

“Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internal suatu negara” (Resenau, 1976: 15).

Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perannya dalam hubungan internasional.

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai tujuan yang terdapat dalam sistemnya.

¹⁷ Lihat juga K.J Holsti, *International Politics: A frameworks for analysis*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1995, atau buku terjemahannya: Wawan Juanda, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Bandung, Bima Cipta, 1997, hlm. 26-28

¹⁸ Ariella Alberthina Yoteni, “Dampak Hubungan Kerjasama Pt Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika”, SKRIPSI HI Universitas Cendrawasih diterbitkan, 2012, hlm. 24

“Politik luar negeri adalah suatu bentuk perilaku adaptif yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian politik luar negeri merupakan tindakan-tindakan autoritatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi aspek-aspek lingkungan internasional yang diinginkannya atau merubah aspek-aspek yang diinginkannya” (Rudy, 1992: 77).

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai;¹⁹

“suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”.

Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan untuk memenuhi kepentingan nasional. Dengan demikian politik luar negeri merupakan wewenang khusus dari pemerintah, karenanya pemerintahlah yang dapat bertindak atas nama seluruh rakyatnya.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eskternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersiapkan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung

¹⁹ <http://faiz-marwan.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-politik-luar-negri.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2016

dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sasaran dan kapabilitas yang dimilikinya.²⁰

Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*) dan pertentangan (*Conflict*).²¹ Pastilah dari semua negara sangat menginginkan situasi aman dan damai melakukan kerjasama merupakan interaksi yang dikatakan interaksi positif, untuk melaksanakan kerjasama ada tiga unsur utama yang berkaitan dengan kerjasama yakni unsur dua aktor ataupun lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika tidak terkandung 3 unsur tersebut maka aktivitas tersebut bukanlah suatu pelaksanaan kerjasama, seperti yang dikatakan oleh Thomson dan Perry dalam Keban.²² Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*Cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *Collaboration*. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *cooperation* terletak pada tingkat yang paling rendah. Sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi. Menurut Rose secara teoritis, istilah kerjasama (*Cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*Economies of Scales*).²³ Pada dasarnya

²⁰ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=27443> diakses pada tanggal 1 Desember 2015

²¹ Idem

²² <http://www.artikel.com/topik/pengertian+teori+kerjasama.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2015

²³ Ariella Alberthina Yoteni, "Dampak Hubungan Kerjasama Pt Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika", SKRIPSI HI Universitas Cendrawasih diterbitkan, 2012, hlm. 22

semua keinginan negara merupakan memenuhi segala kebutuhannya namun keterbatasan selalu menghalangi pencapaiannya, untuk memenuhi kebutuhannya negara akan melakukan interaksi dan komunikasi terhadap negara yang dianggap akan memberikan bantuan kerjasama, kerjasama pada hakekatnya lazim dilaksanakan, *Moh. Jafar Hafsa* menyebut definisi kerjasama.²⁴

“kerjasama adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”

Hubungan yang jelas terlihat antara konflik dan kerjasama internasional, dimana konflik yang ada dapat diakomodasikan melalui negosiasi. Konflik potensial tersebut selalu berakhir melalui tingkatan kerjasama. Jadi hubungan kerjasama selalu menjadi pilihan yang tidak pernah ditinggalkan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Hukum internasional, organisasi internasional, hubungan ekonomi dan diplomasi adalah empat metode negara untuk selalu berusaha mengkordinasikan hubungannya secara konstruktif. Negara-negara menggunakan keempat hal tersebut untuk meningkatkan dan memfasilitasi interrelasi politik dan ekonomi mereka. Selain itu mereka juga menggunakannya untuk mengontrol konflik dan meningkatkan kerjasama kearah yang lebih baik lagi.

“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan

²⁴ <http://lompoulu.blogspot.com/2013/06/pengertian-kerjasama.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2015

berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa” (Soekanto, 1990: 72).

Selain itu, Soerdjono Soekanto mengenai kerjasama:

“Suatu kerjasama akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang” (1990: 80).

Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘*nation understanding*’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1998: 3).

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara maka perlunya suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelansi hubungan

internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak dari negara lain.

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional.

“Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya” (Rudy, 2005: 3).

Keamanan menjadi *low politics* yang lebih menyoroti isu-isu non-keamanan. Kerjasama internasional sendiri merupakan proses utama dan interaksi internasional. Kerjasama internasional pada hakekatnya dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:

a) Kerjasama Multilateral

Hakekat dan kerjasama internasional yang universal (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik internasional.

a. Kerjasama Regional

Merupakan kerjasama antara negara yang berdekatan secara geografis kerjasama jenis ini merupakan gagasan yang mulai dikenal pada awal abad ke 19.

b. Kerjasama Fungsional

Dalam kerjasama fungsional, negara-negara terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu, sehingga kerjasama tersebut akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara.

c. Kerjasama ideology

Kerjasama ini merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya.

Ada tiga motif dalam melakukan suatu kerjasama internasional, yaitu: (Toma & Gorman, 1991: 384).

- Meningkatkan kepentingan nasional
- Memelihara perdamaian
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Konsep kerjasama yang dipakai disini adalah kerjasama yang sifatnya internasional. Ada dua jenis interaksi dalam dunia internasional, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Defenisi kerjasama :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
- c. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk meencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Hosti, 1987: 652-653).

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokkan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua pihak yang bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional, yaitu :

- a. **Konsensus**, merupakan suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
- b. **Kolaborasi**, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang terjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
- c. **Integrasi**, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-

negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat (Smith dan Hocking, 1990: 22).

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional

“Kerjasama dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif “(Doherty dan Pfaltzgraff, 1997: 41). “

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial, dan kerjasama dalam bidang politik.²⁵

²⁵ *Ibid.*

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Ariella bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreements*) dibedakan atas:²⁶

- a. *Handshake Agreement*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
- b. *Written Agreement*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian yang tertulis.

Masih menurut sumber yang sama, pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk:

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri.
- b. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam dalam sharing peralatan yang mahal, atau tidak setiap hari digunakan.
- d. *Joint Service*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan public.

²⁶ Ariella Alberthina Yoteni, "Dampak Hubungan Kerjasama Pt Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika", SKRIPSI HI Universitas Cendrawasih diterbitkan, 2012, hlm. 24

- e. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- f. *Contract Service*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya dalam membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Kerjasama antar negara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu. Walaupun disisi lain apabila tujuan nasionalnya tidak tercapai, berbagai kemungkinan akan terjadi mulai dari ketegangan sampai kepada terjadinya konflik atau lebih tinggi lagi eskalasinya adalah perang.²⁷

Apabila dilihat dari bentuknya, kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua negara atau lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu *treaty* yang

²⁷ Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 136

tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)*.²⁸

Kerjasama pertahanan, merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, karena kerjasama ini sangat sensitive dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, kestabilitas dan kesejahteraan rakyat.

Adapun ruang lingkup kerjasama pertahanan akan menjadi sangat penting apabila dalam substansinya akan menyangkut pada ruang wilayah atau territory yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Ruang lingkup kerjasama biasanya berisi tentang kerjasama:²⁹

- a. Teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah;
- b. Pertukaran para ahli, teknis dan peserta dosen militer;
- c. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
- d. Industri pertahanan;
- e. Alih teknologi;
- f. Bantuan teknis;
- g. Pendidikan dan latihan;
- h. Pertukaran informasi intelejen;
- i. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

²⁸ *Ibid.*, hlm. 139

²⁹ *Ibid.*, hlm. 152

- j. Pertukaran personil;
- k. Kunjungan;
- l. Latihan bersama dalam bidang operasi, logistic dan intelegen;
- m. Latihan gabungan dan latihan bersama;
- n. Patrol bersama dan atau gabungan;
- o. Pengembangan dan latihan komunikasi, peperangan elektronika dan TI;
- p. Litbang;
- q. Keamanan maritime; dan lain sebagainya

Kerjasama perthanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerjasama akan tertulis pada perjanjian (apapun namanya), antara lain untuk:³⁰

- a. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia;
- b. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
- c. Mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral;
- d. Mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara;
- e. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan;

³⁰ *Ibid.*, hlm. 150

- f. Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan;
- g. Meningkatkan saling percaya;
- h. Mengintegrasikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada (bila sebelumnya sudah ada persetujuan);
- i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara;

Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan kepada tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut. Indonesia sebagai suatu entitas dalam merumuskan politik luar negerinya berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan domestik. Dalam buku yang ditulis Miriam Budiarmo, terdapat definisi politik luar negeri Sebagai

“Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.³¹

Berarti bahwa politik luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Konsep tentang politik luar negeri sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya adalah Mappa Nasrun yang memberikan konsep tentang kebijaksanaan luar negeri, yaitu:

³¹ Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1995, hal 12.

“Kebijaksanaan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal”³².

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam memberikan batasan tentang kebijaksanaan luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan suatu politik luar negeri. Sebagai bagian dari politik luar negeri, maka politik luar negeri jika ditinjau dari segi proses maka akan erat kaitannya dengan politik dalam negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negara tetapi lebih khusus kepada badan yudikatif sebagai perumus kebijakan dan badan eksekutif negara selaku pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut yang sewaktu-waktu dapat pula bertindak sebagai pengambil kebijakan jika diberikan kewenangan oleh konstitusi negaranya.

Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Karenanya politik luar negeri dapat juga diartikan sebagai strategi yang atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau actor hubungan internasional lain.

³² Mappa Nasrun, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect*, Desertasi, Unahs: 1990, hal. 98.

Dari kedua konsep diatas, dapat ditarik bahwa politik luar negeri adalah sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan internasional dalam bentuk strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu negara.³³

Prinsip dari keamanan nasional adalah ancaman dapat langsung dihadapi pada saat ancaman itu muncul dari tindakan pencegahan dalam menghadapi ancaman sepenuhnya berada dibawah wewenang negara. Secara teoritis dan berdasarkan sumber daya yang ada, tindakan pencegahan dapat diambil untuk menghadapi segala macam ancaman. Didi Khrisna dalam bukunya Kamus Politik Internasional, mendefinisikan keamanan sebagai berikut:

“keamanan adalah kewajiban suatu negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga masyarakat dapat sejalan segala aktivitasnya dengan tenteram dan melindungi negara tersebut dalam hubungan internasional, kesemua itu untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai kebutuhan fundamental berdirinya suatu negara”.³⁴

Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara

³³https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinh-WtnrrJAhWUSI4KHxWFADsQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F132946-T%252027791-Politik%2520luar-Tinjauan%2520literatur.pdf&usg=AFQjCNHWeVyLG0cY7C_zmDjZkCROF9M1tg&bvm=bv.108194040,d.c2E diakses pada tanggal 1 Desember 2015

³⁴ Didi Khrisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Abardin, 1993), hlm. 295

tepat dan. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³⁵

Pertahanan negara adalah tanggung jawab setiap warga negara. Dan sesungguhnya dengan sumber daya yang besar yang dimiliki, Indonesia dapat membentuk kekuatan pertahanan yang besar pula. Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang baik tentu harus terlebih dahulu dibentuk sistem pertahanan yang komprehensif, agar dapat mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menangkal segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Dan untuk menjalankan sistem pertahanan tersebut perlu dibentuk doktrin pertahanan negara sebagai acuan bagi komponen-komponen pertahanan yang terlibat.³⁶

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan

³⁵ UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia diakses pada tanggal 3 Desember 2015

³⁶ Pertahanan Negara Indonesia dalam http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia diakses pada tanggal 3 Desember 2015

sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.³⁷

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.

"Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

a. Para militer

- Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara diakses pada tanggal 3 Desember 2015

- Resimen mahasiswa (Menwa)
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
 - Satuan pengamanan (Satpam)
 - Organisasi kepemudaan
 - Organisasi bela diri
 - Satuan tugas (Satgas) partai
- b. Tenaga ahli/profesi
- Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi.
- c. Industri
- Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.
- d. Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana
- Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
 - Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara

- Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

e. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb)

Sementara, menurut Buzan keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani segera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan criteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam 5 dimensi:³⁸

³⁸ Barry Buzan, *people, state, and fear: an agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, (Hampstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm 74.

- a. Militer, munculnya kapabilitas militer dari suatu negara baik konvensional maupun non-konvensional, dalam strategi menyerang atau bertahan, persepsi ancaman militer dari negara terhadap negara lain.
- b. Politik, perhatian terhadap stabilitas institusi-institusi negara, proses politik, sistem pemerintahan dan ideology sebagai legitimasi aktivitas mereka.
- c. Ekonomi, masalah akses terhadap sumber daya-sumber daya, financial dan pasar guna mempertahankan kemakmuran dan kekuatan negara.
- d. Sosial, perhatian terhadap keberlanjutan dan penerimaan masyarakat sosial terhadap perubahan-perubahan sosial, termasuk pola-pola bahasa, budaya, kebiasaan dan identitas nasional, dimana perubahan ini akan berdampak pada perilaku negara tersebut terutama dalam dunia internasional.
- e. Lingkungan, memperhatikan masalah penerimaan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem dimana kemanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda beda.

Masih menurut Buzan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Adapun beberapa bentuk

ancaman adalah ancaman tradisional (ancaman militer) dan non-tradisional (non-militer).

Ancama tradisional yaitu ancaman terhadap negara yang berbentuk militer adalah suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta membahayakan dapat membahayakan keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Ada beberapa contoh ancaman terhadap negara yang termasuk dalam ancaman militer:

- a. Agresi, pengertian dari agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut.
- b. Ancaman militer yang ke dua dapat berupa suatu pelanggaran wilayah yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
- c. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara.
- d. Sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek

vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa.

- e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas (internasional) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerjasama dengan terorisme lokal (dalam negeri).
- f. Ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata.
- g. Selain pemberontakan, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer.

Sementara itu, ancaman non-tradisional adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa.

Komponen utama untuk menghadapi ancaman non militer ini adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Contoh ancaman non-tradisional adalah:

- a. Perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang)

- b. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
- c. Penangkapan ikan di laut secara ilegal
- d. Banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- e. Berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri
- f. Kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya.³⁹

Selain kerjasama pertahanan tentu ada juga Diplomasi Pertahanan (*Defence Diplomacy*), yang mana diplomasi pertahanan hanyalah merupakan bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, namun tidak semua bisa ditangani oleh Kemlu, karena ada yang tidak dapat tersentuh oleh kalangan diplomat di luar negeri dalam melakukan hubungannya. Sehingga masih tetap diperlukan adanya diplomasi pertahanan, antara lain dilakukan oleh Atase Pertahanan atau para perwira militer yang sedang bertugas di suatu negara tertentu.

Pertimbangan utama dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, anatara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kepentingan nasional;
- b. Kebijakan keamanan nasional;
- c. Kebijakan dal bidang-bidang lain;
- d. Kebijaka pertahanan;
- e. Lingkungan internasional;

³⁹ <http://www.kitapunya.net/2015/08/bentuk-bentuk-ancaman-terhadap-negara.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2015

⁴⁰ Ibid., hlm. 179

- f. Lingkungan domestic;
- g. Lingkungan nasional dari negara-negara;
- h. Prioritas negara-negara;
- i. Kemampuan dan kekuatan Angkatan Bersenjata;
- j. Piranti lunak (peraturan perundangan);
- k. Personil;
- l. Sarana dan prasarana;
- m. Dukungan anggaran;

Hal-hal yang semestinya dilakukan diplomasi pertahanan antara lain:⁴¹

- a. Menindaklanjuti seluruh perjanjian atau MoU yang telah ditandatangani, baik oleh kementerian pertahanan, markas besar angkatan bersenjata dan angkatan.
- b. Penanganan-penanganan krisis yang termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam bentuk: penanganan separatisme dan pemberontakan bersenjata; menangani terorisme; pengamanan wilayah perbatasan; melaksanakan tugas perdamaian dunia; membantu menaggulangi bencana alam, bantuan kemanusiaan dan pengungsian; pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

⁴¹ Ibid., hlm 181

- c. *Capacity Building*; pelatihan militer; pendidikan militer.
- d. Poleksosbud; persahabatan; kerjasama bilateral budaya, ekonomi dan perdagangan; pariwisata; kunjungan pejabat dan promosi produksi industri pertahanan nasional.
- e. Keamanan Nasional/TNI: pertukaran informasi; terorisme, *maritime security*; keamanan regional; *sharing* informasi.
- f. Intelejen strategis: Sebagai *entrepreneurship* untuk mempromosikan produk strategis dan produk-produk militer ke negara di tempat penugasan.

Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Industri pertahanan adalah Industri nasional (pemerintah maupun swasta) yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. Industri pertahanan, juga disebut industri militer, terdiri dari pemerintah dan industri komersial yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan pelayanan peralatan dan fasilitas militer.

Adapun beberapa kriteria yang dimiliki industri pertahanan, yaitu:

- a. Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional dan tergolong dalam kelompok industri strategis.
- b. Industri pertahanan bersumber dari potensi industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta.
- c. Industri pertahanan berkemampuan menghasilkan sistem senjata, peralatan dan dukungan logistik serta jasa-jasa bagi kepentingan pertahanan, disamping itu mampu menghasilkan produk-produk komersial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Industri pertahanan dalam pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.
- e. Industri pertahanan harus mampu mengkonversikan/ menstransformasikan kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan khususnya dalam keadaan darurat/perang.
- f. Industri pertahanan merupakan sandaran utama penyelenggaraan mobilitas industri dalam keadaan darurat perang.
- g. Industri pertahanan atau setidaknya industri pendukung administrasi dan logistik harus diupayakan tersebar diseluruh wilayah nasional.
- h. Industri pertahanan dikembangkan secara bertahap sesuai perkembangan postur Angkatan Bersenjata dan tuntutan perkembangan teknologi sistem senjata.

- i. Industri pertahanan harus mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan dari luar negeri dibidang pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan.
- j. Industri pertahanan harus didukung oleh kemampuan RDT & E (Research Development Test & Evaluation) yang tangguh dan konsisten terhadap perkembangan Iptek.

Industri pertahanan dapat terdiri dari industri milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri :

- a. Kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar.
- b. Kelompok industri hilir kelompok industri kecil.

Industri pertahanan harus mengembangkan dua jalur produksi, yaitu jalur memproduksi barang-barang umum dan memproduksi kebutuhan pertahanan negara. Perbandingan kapasitas antara jalur pertama dengan jalur kedua tergantung pada situasi yang dihadapi. Dalam keadaan damai jalur pertama lebih besar, sedangkan pada keadaan darurat/perang harus mampu dikembangkan dengan cepat melalui konvensi atau transformasi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pertahanan negara yang meningkat. Karena industri pertahanan bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pertahanan, maka diperlukan institusi pembina yang menjembatani kepentingan Angkatan Bersenjata sebagai konsumen dengan industri sebagai

produsen. Dalam menghadapi keadaan darurat/perang, industri pertahanan merupakan sandaran utama bagi pelaksanaan mobilitas industri. Karena itu harus sudah terinventarisasi dan teridentifikasi sedini mungkin pada waktu damai.

Adapun beberapa aspek pembinaan industri pertahanan, yang diantaranya:

- a. Aspek pengaturan dan kebijakan :
 - Penetapan industri pertahanan.
 - Pengaturan kebijakan produksi bagi keperluan komersial dan pertahanan.
 - Penunjukan Departemen Pertahanan sebagai supervisi bagi industri pertahanan.
 - Perumusan program pembangunan industri pertahanan berdasarkan skala prioritas.
- b. Aspek kelembagaan. Membentuk institusi baru di luar struktur Dephan yang berfungsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi dan produk alat peralatan pertahanan, serta menjembatani kepentingan Angkatan Bersenjata dan industri.
- c. Aspek pendayagunaan industri :
 - Pembaharuan manajemen industri melalui peninjauan kembali visi dan misi industri.
 - Mendorong berdirinya dan menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah sebagai industri pendukung.

- Mendorong peningkatan profit melalui kegiatan produksi yang menghasilkan barang komersial selain alat peralatan pertahanan.
- Mewujudkan program sertifikasi bagi produk pertahanan, sebagai pendorong kegiatan ekspor alat peralatan pertahanan.
- Mendorong pertumbuhan dan pengembangan peningkatan struktur perusahaan.

Industri senjata adalah industri global dan bisnis yang memproduksi dan menjual senjata dan teknologi militer dan peralatan. Perusahaan yang memproduksi senjata, juga disebut sebagai perusahaan atau industri pertahanan militer, terutama untuk memproduksi senjata angkatan bersenjata. Produk meliputi: senjata, amunisi, rudal, pesawat militer, kendaraan militer, kapal, sistem elektronik, dan banyak lagi. Industri senjata juga melakukan penelitian dan pengembangan yang signifikan.

Diperkirakan bahwa setiap tahunnya, lebih dari 1 triliun dolar yang dihabiskan untuk pengeluaran militer di seluruh dunia (2% dari GDP dunia). Untuk pengadaan hardware dan layanan dari industri militer. Penjualan senjata gabungan dari 100 perusahaan memproduksi senjata terbesar berjumlah sekitar \$ 315 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2004 lebih dari \$ 30 miliar dihabiskan di perdagangan senjata internasional (kecuali penjualan domestik). Perdagangan senjata juga menjadi salah satu sektor terkena dampak dari krisis kredit, dengan total nilai transaksi pasar mengurangi separuh dari US \$ 32.9bn menjadi US \$ 14.3bn pada tahun 2008. Banyak negara-negara industri memiliki industri senjata dalam negeri untuk memasok

pasukan militer mereka sendiri. Beberapa negara juga memiliki hukum yang substansial atau perdagangan senjata ilegal dalam negeri untuk digunakan oleh warganya. Perdagangan ilegal senjata kecil yang lazim di banyak negara dan daerah dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik.

Kontrak untuk memasok negara tertentu militer diberikan oleh pemerintah, membuat substansial kontrak politik penting. Link antara politik dan perdagangan senjata dapat mengakibatkan perkembangan yang digambarkan Presiden AS Dwight D. Eisenhower sebagai sebuah industri militer, di mana angkatan bersenjata, perdagangan, dan politik menjadi berhubungan erat. Berbagai perusahaan yang kompleks, beberapa diadakan oleh pemerintah, yang lainnya oleh swasta, tawaran untuk kontrak-kontrak ini, yang sering kali bernilai miliaran dolar. Kadang-kadang, seperti kontrak yang baru Joint Strike Fighter, proses tender yang kompetitif terjadi, di mana keputusan dibuat pada manfaat dari desain yang diajukan oleh perusahaan yang terlibat.

Dalam Era Perang Dingin, ekspor senjata yang digunakan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk memengaruhi klasemen mereka di negara lain, khususnya Negara-negara Dunia Ketiga. Sejak jatuhnya Uni Soviet, pada awalnya ekspor senjata global jatuh sedikit, tetapi sejak tahun 2003 tumbuh lagi, dan sekarang mendekati level Perang Dingin. Amerika Serikat adalah pemasok atas keseluruhan senjata. Amerika Serikat adalah juga bagian atas pemasok senjata kepada negara berkembang,

terhitung sekitar 36% dari penjualan senjata di seluruh dunia, diikuti oleh Rusia, Inggris, Jerman dan Cina.

Diperkirakan pada tahun 2003, ada lebih dari 639 million senjata kecil dalam sirkulasi, dan bahwa lebih dari 1.135 perusahaan yang berbasis di lebih dari 98 negara yang berbeda pembuatan senjata ringan serta berbagai komponen dan amunisi.⁴²

Dari uraian yang sudah penulis jelaskan dari latar belakang hingga kerangka teoritis, penulis membuat asumsi guna memperkuat hipotesis, yakni:

- a. Karena kebutuhan akan kekuatan baru alutsista Indonesia untuk menghadapi ancaman serius di era globalisasi saat ini maka, Indonesia harus melakukan kerjasama demi kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan kekuatan alutsista bagi pertahanan Indonesia.
- b. Rheinmetall Jerman dipercaya sebagai pihak yang memiliki keuntungan bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya khususnya dalam pengadaan MBT (*Main Battle Tank*) Leopard. Hal ini diperkuat dengan adanya kontrak kerjasama antara Indonesia dengan Rheinmetall pada Kamis 8 Nopember 2012.
- c. Dengan penambahan alutsista baru berupa MBT Leopard di Indonesia ini akan memiliki tambahan kekuatan baru bagi alutsista Indonesia dan dari pengadaan MBT tersebut memberikan muatan alih teknologi yang modern bagi industri pertahanan dalam negeri.

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_pertahanan diakses pada tanggal 3 Desember 2015

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Kerjasama Indonesia – Jerman melalui Rheinmetall dalam pengadaan Tank Leopard dan ToT (*Transfer of Technology*) membawa pengaruh signifikan berupa peningkatan kemampuan alutsista serta peningkatan kualitas industri pertahanan dalam negeri”.

3. Operasional Variabel Indikator

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

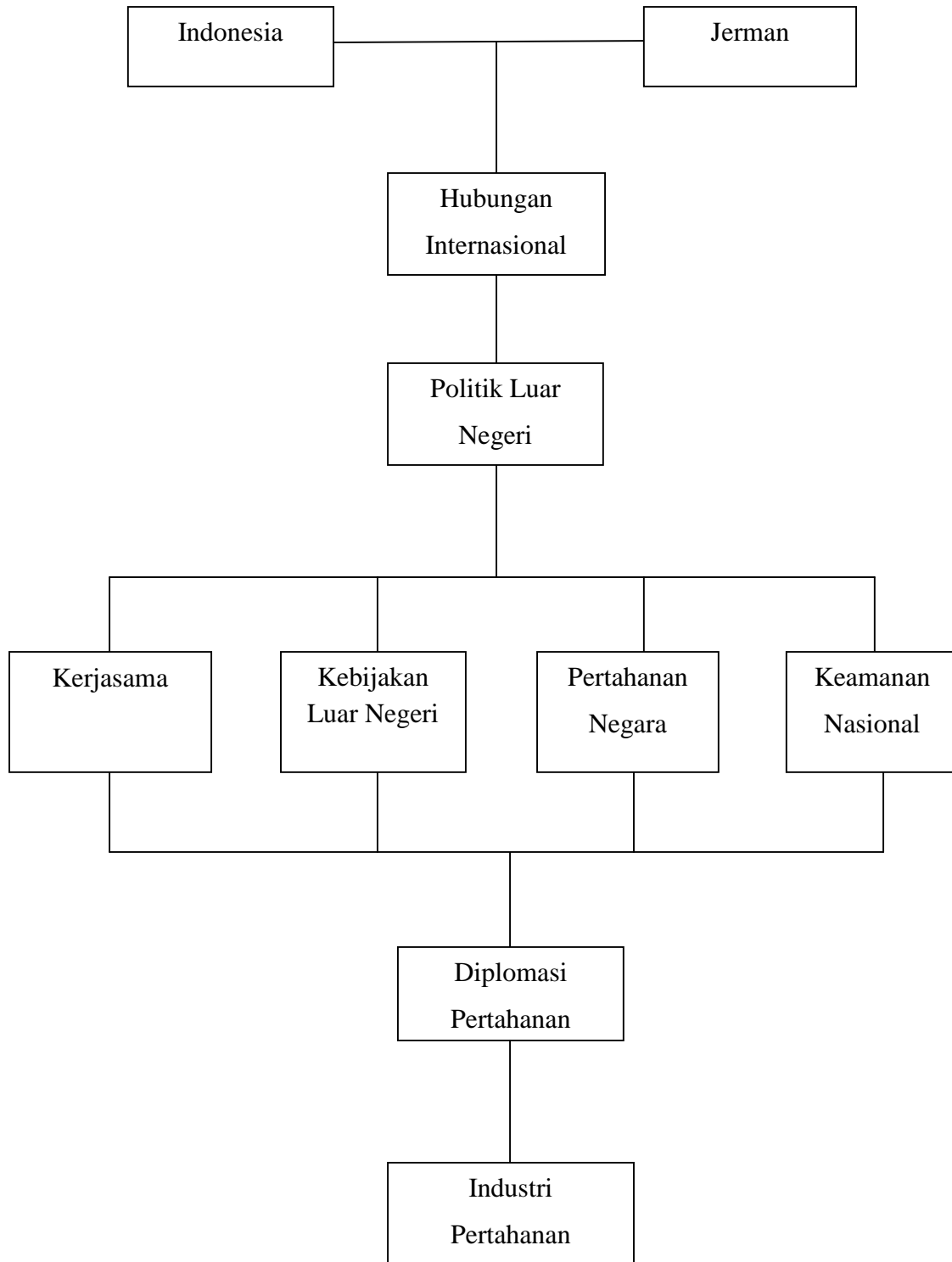
Tabel 3.1

Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Perkembangan Kerjasama Pertahanan Indonesia - Jerman	1. Adanya kesepakatan kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. 2. Adanya tahapan dalam pengiriman Tank Leopard dari Jerman ke Indonesia. 3. Adanya perkembangan alutsista militer Indonesia	1. Data dan fakta adanya kesepakatan kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal (http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-nasional-indonesia-dan-minimum-essential-force-mef/#_ftn9) 2. Data dan fakta mengenai tahapan pengiriman Tank Leopard dari Jerman ke Indonesia (http://jakartagreater.com/kedatangan-leopard-dan-konsep-mef/) 3. Data dan fakta mengenai perkembangan alutsista Indonesia dengan hadirnya Tank Leopard (wawancara bersama Bapak Denny PUSENKAV tanggal 15 Februari 2016)

<p>Variabel Terikat: Implikasinya bagi industri pertahanan dalam negeri</p>	<p>1. Adanya kesepakatan dalam muatan alih teknologi (<i>Transfer of Technology</i>) berupa perawatan dan penyediaan amunisi berkaliber 120mm bersama PT. Pindad</p> <p>2. UU dan keputusan Kemenhan yang mengatur dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri</p>	<p>1. data dan fakta adanya kesepakatan muatan alih teknologi (<i>Transfer of Technology</i>) berupa perawatan dan penyediaan amunisi berkaliber 120mm bersama PT. Pindad (http://arc.web.id/berita/618-tank-leopard-pilihan-tepat-untuk-memperkuat-tni)</p> <p>2. Data dan fakta mengenai UU yang mengatur mengenai dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri</p>
---	---	--

4. Skema Kerangka Teoritis



E. Tingkat Analisis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis (*Level of Analysis*) dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilah masalah yang akan dianalisa. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam pemikiran ini dengan analisis model korelasional dimana tingkat unit eksplanasi dan unit analisisnya sama. Unit eksplanasi dalam pemikiran ini yaitu kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG, Jerman dalam pengadaan Tank Leopard dan dampaknya terhadap industri pertahanan dalam negeri.

2. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variable yang saling terkait. Penulis juga menggunakan kategori penelitian deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati.⁴³

⁴³<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/02/perbedaan-penelitian-kualitatif-dan.html?m=1>
diakses 5 November 2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti memilih teknik penulisan yakni:

- a. Melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang tengah dibahas serta pemanfaatan internet untuk mendapatkan data tertulis yang didokumentasikan.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara langsung melakukan suatu dialog (interaksi tanya-jawab) dengan pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD

Jl. Ciremai no 9 Bandung.

b. PT. Pindad Persero

Jl. Jendral Gatot Subroto No.517 Bandung, Jawa Barat

c. Perpustakaan Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat

2. Lama Penelitian

Penelitian diprogramkan 6 bulan, di mulai bulan November – Mei 2015.

Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2, Pada halaman berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dankegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Yang mana kedua kerangka tersebut dilengkapi dengan penjelasan akan operasionalisasi variable dan indicator, skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Operasionalisasi dari Variabel Bebas

Bab ini menguraikan tentang seberapa jauh kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG, Jerman dalam pengadaan Tank Leopard bagi perkembangan aslutsista pertahanan Indonesia.

BAB III: Operasionalisasi dari Variabel Terikat

Bab ini menguraikan tentang dampak yang ditimbulkan dari bentuk kerjasama Indonesia dengan Rheinmetall AG, Jerman dalam pengadaan Tank Leopard dimana dalam kerjasama itu terselipkan muatan alih teknologi atau *Transfer of Technology* bagi industri pertahanan dalam negeri.

BAB IV: Verifikasi Data

Dalam Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab Rumusan Masalah yang di deskripsikan dalam data.

BAB V: Kesimpulan

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil

